

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin meneliti kembali dari hasil penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis penerapan akuntansi lingkungan terhadap Pengelolaan limbah pada PG Djatiroto), Fitri Nilasari (2014).	penerapan akuntansi lingkungan dan Pengelolaan limbah.	Deskriptif kualitatif	perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan (dalam hal pengelolaan limbah) dan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan Akan tetapi, berdasarkan analisis yang telah dilakukan ada beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi PG Djatiroto dalam hal penerapan akuntansi lingkungan untuk masa akan datang.
2	Analisis penerapan akuntansi biaya lingkungan Pada PT. Royal coconut airmadidi, Regina Mariana Franciska (2019).	akuntansi biaya lingkungan	Deskriptif kualitatif	Biaya-biaya Lingkungan yang telah teridentifikasi terkait pengolahan limbah yang ada pada PT. Royal Coconut Airmadidi yaitu: Biaya Tenaga Kerja IPAL, Biaya Pengujian Kualitas Air Limbah, Biaya Listrik untuk pemakaian pompa air, Biaya Pembelian Kaporit, Biaya Pengujian Kualitas Udara, Biaya Investasi, serta Biaya Pemulihan Tanah.
3	The Effect Of Greenhouse Gas Emissions Disclosure And	Gas Emissions Disclosure And Environmental	Deskriptif kualitatif	Pentingnya akuntansi lingkungan sebagai bagian dari pendidikan akuntansi, ikhtisar masa lalu dan status peraturan

	Environmental Performance On Firm Value: Indonesia Evidence, Heba Y. M. Abdel- Rahim dan Yousef M. Abdel- Rahim (2017).	Performance		dan wajib saat akuntansi lingkungan dan hubungannya dengan profesi yang berbeda. Sistem pengarsipan lingkungan wajib dan mengeksplorasi karakteristik dan potensi manfaat.
4	Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Badan Usaha Milik Desa Putu Anik Yuliantini (2017).	Akuntansi Lingkungan	Deskriptif kualitatif	Tidak terdapat perlakuan khusus terhadap biaya-biaya lingkungan pada BUM Desa Desa Tajun. BUM Desa Desa Tajun melalui unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu hanya menerapkan akuntansi lingkungan secara normatif, sehingga dapat dikatakan BUM Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun belum menerapkan akuntansi lingkungan secara sempurna
5	<i>The Implementation Of Accounting For Environmental Liabilities</i> Suhita Santi Medina (2019)	<i>Accounting For Environmental Liabilities</i>	<i>deskriptif</i>	<i>The accounting for environmental Liabilities related to recognition, measurement, recording, disclosure, and reporting has not been regulated in financial accounting standards, so the reporting for environmental liabilities is still voluntary</i>

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu, memiliki persamaan yaitu sama- sama meneliti mengenai akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah serta metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu terletak pada pemilihan obyek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh

Fitri Nilasari (2014) pada PG Djatiroto), Regina Mariana Franciska (2019) Pada PT. Royal coconut airmadidi, Heba Y. M. Abdel- Rahim dan Yousef M. Abdel- Rahim (2017) pada pengelolaan limbah di Indonesia dan Putu Anik Yuliantini (2017) Pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin menguji kembali di PG Tjombang Baru Jombang tahun 2019

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi telah secara ekstensif digunakan untuk menjelaskan motivasi pengungkapan lingkungan secara sukarela oleh organisasi. Legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan gibbs, 1990 dalam Abdullah, 2015).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang.

Yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, dalam Jannah, 2014). Asumsi legitimasi memiliki hubungan ciri-ciri otoritatif, hukum, perasaan, mengikat, atau kebenaran yang melekat pada suatu tatanan pemerintahan atau negara dianggap sah, jika memiliki hak-hak untuk memerintah (Ikbali, 2012)

Legitimasi masyarakat merupakan factor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi Nor, 2011:87). Legitimasi

merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) dalam Hadi Nor (2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

” a systems – oriented view of organization and society...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organization, the state, individuals and group”.

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat (Gray et. al, 1996) dalam (Hadi Nor (2011:88). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran masyarakat dan lingkungan (Hadi Nor, 2011). Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Nor (2011:89) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Nor (2011:90) Peran penting legitimasi stakeholder, dalam teori marketing baru didudukkan pada posisi *distress strategy*. Hal itu karena, sejalan dengan perkembangan pola pikir dan kesadaran masyarakat, memiliki kepentingan untuk terlindungi kehidupan dan kepentingan terhadap alam.

Wartick dan Mahon (1994) dalam Hadi Nor (2011:90) mengatakan bahwa *legitimacy gap (lin congruence)* dapat terjadi krena beberapa factor, seperti :

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya (Dowling dan Preffer, 1975). Lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu : (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai di masyarakat, (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.

Pattern (1992) dalam Nor (2011:91) menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan cara :

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggungjawab sosial (*social responsibility*).

2.2.2 Teori Stakeholder (*stakeholder theory*)

Menurut Nor (2011:93) Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Fenomena seperti itu terjadi, karena adanya

tuntutan dari masyarakat akibat negative externalities yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2002) dalam (Hadi Nor, 2011:93). Untuk itu, tanggungjawab perusahaan yang semula diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan factor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap stakeholder, baik internal maupun eksternal.

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat lngsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. *Stakeholder is a group or an individual who can effect, or be effected by, the success or failure of an organization* (Luk, et al. 2005) dalam (Hadi Nor, 2011:93). Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan (Nor, 2011:93).

“.....(stakeholder are) individuals and groups who have legitimate claim on the organization to participate in the decissionmaking process simply because they are effected by the organization’s practices, policies, and actions”

Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan (Hummels, 1998) dalam (Hadi Nor, 2011:94). Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian,

keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut Ghozali dan Chariri (2007) dalam Rinaldy (2011).

Freeman (1983) dalam Suryonugroho (2016) mengelompokkan *stakeholder* menjadi 2 yaitu:

a. *Stakeholder* primer

Merupakan *stakeholder* yang mempengaruhi serta dipengaruhi secara langsung oleh strategi dari perusahaan. Kelompok ini berisikan anggota *shareholder* diantaranya adalah pemilik, investor, karyawan maupun konsumen.

b. *Stakeholder* sekunder

Merupakan *stakeholder* yang mempengaruhi maupun dipengaruhi secara tidak langsung dari strategi perusahaan, dimana anggotanya ialah pemerintah, masyarakat umum, serta lingkungan.

2.2.3 Akuntansi Lingkungan

Akuntansi Lingkungan merupakan penggabungan informasi manfaat dan biaya lingkungan kedalam macam-macam praktik akuntansi dan penggabungan biaya lingkungan kedalam keputusan bisnis (Amiruddin, 2012). Akuntansi Lingkungan merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan (Aniela, 2012).

Akuntansi Lingkungan adalah bagaimana memasukan konskuensi dari suatu peristiwa yang menyangkut lingkungan dalam laporan keuangan. Akuntansi Lingkungan merupakan sarana untuk melaporkan suatu perusahaan yang dikaitkan dengan lingkungan. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan. Motivasi yang melatarbelakangi perusahaan untuk melaporkan permasalahan lingkungan lebih didominasi oleh faktor kesukarelaan (Ball, 2009).

Akuntansi lingkungan memberikan laporan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat dan untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya (Idris, 2012), sehingga dapat mengetahui kegiatan perusahaan dalam upaya menangani pencemaran lingkungan serta kewajiban perusahaan atas masalah tersebut melalui laporan keuangan perusahaan.

Akuntansi lingkungan merupakan sarana untuk melaporkan operasional suatu perusahaan yang dikaitkan dengan biaya lingkungan (Martusa, 2009). Perusahaan yang ingin mencapai *corporate sustainability* di samping harus memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, juga harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga akan terjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya (Sunaryo, 2013). Akuntansi konvensional hanya memberikan informasi ekonomi terutama yang bersifat keuangan pada *shareholder* dan *bondholder* untuk pengambilan keputusan. Perlu ditingkatkan ukuran kinerja untuk memperbaiki ukuran kinerja yang telah ada. Dampak lingkungan perlu dilaporkan sebagai manifestasi tanggungjawab terhadap *stakeholder*.

Akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya- biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stockholders* perusahaan (Astuti, 2002 dalam Wahyudi, 2012).

Landasan pemikiran akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berusaha menspesifikasikan biaya yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan. Melalui penerapan *green accounting* maka diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan *green accounting* maka perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya.

Hidayat (2011). Akuntansi lingkungan adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan mempersiapkan laporan terkait lingkungan dan data keuangan dengan maksud untuk mengurangi dampak dan biaya dari kerusakan lingkungan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan mengadopsi International Accounting Standards (IAS). Standar yang pada umumnya dipandang sebagai terkait dengan aktivitas lingkungan adalah PSAK No. 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK No. 57 tentang provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, PSAK No. 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK dan No. 5 tentang segmen operasi. Exposure Draft (ED) yang juga terkait dengan aktivitas lingkungan dan sedang dalam proses untuk disahkan menjadi standar adalah ED PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum dan ED PSAK No. 64 tentang eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.

PSAK No. 1 tahun 2015 diadopsi dari IAS 1: Presentation of Financial Statement. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas atau organisasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 1) laporan posisi keuangan atau neraca, 2) laporan laba rugi komprehensif, 3) laporan perubahan ekuitas, 4) laporan arus kas, 5) catatan atas laporan keuangan – yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan, 6) laporan posisi keuangan komparatif yang disajikan jika entitas menerapkan kebijakan yang berlaku retrospektif atau terjadi reklasifikasi pos-pos laporan keuangan. Terpisah dari laporan keuangan, entitas menyampaikan kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan kinerja keuangan dan posisi keuangan serta kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Salah satu kajian yang bisa disampaikan adalah faktor yang memberikan pengaruh utama dalam pencapaian kinerja keuangan seperti perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi.

Entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup khususnya untuk industri yang sangat terkait erat dengan faktor lingkungan hidup

PSAK No. 57 yang diadopsi dari IAS 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets menunjukkan contoh transaksi atau kejadian yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas lingkungan. Misalnya suatu entitas yang bergerak dalam industri pertambangan minyak di sebuah negara telah melakukan pencemaran lingkungan selama bertahun-tahun.

Negara tersebut sudah lama tidak memiliki regulasi mengenai pembersihan pencemaran lingkungan, namun pada tahun akhir tahun ini akan diterbitkan regulasi tentang pembersihan tersebut. Dalam hal ini, entitas harus mencatat adanya provisi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Estimasi terbaik adalah jumlah kini dengan dampak nilai waktu uang yang signifikan atau material.

Hal yang sama akan dilakukan oleh entitas, jika, meskipun tidak ada regulasi yang mengatur mengenai pembersihan pencemaran lingkungan, namun entitas memiliki kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup yang dipublikasikan luas dan entitas dikenal memiliki reputasi untuk menghormati kebijakan yang dipublikasikan tersebut.

Dalam hal ini provisi yang diakui digolongkan sebagai kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang 1) berdasarkan praktek baku di masa lalu, entitas memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu melalui publikasi atau pernyataan spesifik, dan 2) entitas menciptakan ekspektasi kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan kewajiban tersebut.

Analisis lingkungan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 tahun 2015 tersebut antara lain sebagai berikut (Mulyani, 2016)

a. Identifikasi

Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan *eksternality* yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak negatif tersebut.

b. Pengakuan

Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah itu dialokasikan tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya dilakukan pada saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan lingkungan.

c. Pengukuran

Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil setiap periode.

Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda.

d. Penyajian

Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan umum.

Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda, sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut.

e. Pengungkapan

Pada umumnya, akuntan akan mencatat biaya biaya tambahan ini dalam akuntansi konvensional sebagai biaya *overhead* yang berarti belum dilakukan spesialisasi rekening untuk pos biaya lingkungan

2.2.4 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya (Sari, 2013). Pencemaran lingkungan adalah rusaknya lingkungan akibat aktivitas manusia dan alam. Aktivitas manusia misalnya, volusi dari aktivitas pabrik dan kendaraan, Limbak pabrik, Asap pabrik, dan lain sebagainya. Sedangkan dari alam seperti, Bencana alam yakni, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung yang meletus, lonsor dan lain-lain (Riduwan dan andayani, 2011).

Maraknya pencemaran lingkungan yang terjadi khususnya pencemaran akibat aktivitas pabrik memaksa audit lingkungan ini untuk dilaksanakan karena masih banyak perusahaan industri yang limbahnya

mencemari lingkungan walaupun perusahaan tersebut mempunyai dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai bagian dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sebagai pedoman melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan disekitar perusahaan tersebut

Berkembangnya industri tidak bisa dipungkiri menimbulkan efek permasalahan terhadap lingkungan, dimana perilaku industri seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, seperti timbulnya polusi air, tanah, udara dan adanya kesenjangan sosial pada lingkungan (Hidayat, 2011)

Pencemaran lingkungan dapat diatasi dengan cara menerapkan *Environmental Managemen Accounting (EMA)* (Moedjanarko, 2013). Pencemaran lingkungan yang dihasilkan akibat dari aktivitas industri gula dalam bentuk padat dibagi menjadi dua yaitu abu tebu dan blotong. Abu tebu merugikan masyarakat dalam segi pertanian.

Hal ini dapat dilihat dari keberadaan abu tebu yang menurunkan tingkat kesuburan tanah. Sedangkan menurut Herlina Fitrihidajati Hadi, blotong adalah limbah padat hasil dari proses produksi pembuatan gula. Blotong ini cenderung dihasilkan cukup besar dalam setiap produksi pembuatan gula. Sehingga terjadi penumpukan di mana-mana. Penumpukan blotong pada lahan-lahan kosong berpotensi menjadi sumber pencemaran karena dapat ikut aliran air hujan yang masuk ke sungai di sekitar pabrik.

Pencemaran air sungai dapat berupa bau yang mebusuk dan pengurangan oksigen dalam air, sedang blotong yang ditumpuk dalam keadaan basah dapat menimbulkan bau yang menusuk dan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Sedangkan dalam bentuk cairan, limbah industri ini berbahaya karena merusak ekosistem air. Untuk itu perlu diadakannya pemanfaatan daripada limbah cair itu sendiri untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Manusia berperan

sangat penting dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan baik dimulai dari lingkungan yang paling kecil hingga lingkungan yang paling luas (Sari, 2013)

2.2.5 Tanggung jawab Lingkungan Perusahaan

Masalah tanggung jawab sosial perusahaan mulai muncul pada awal abad ke 20. Pada dekade tahun 1975 akuntansi sosial menjadi isu baru yang membahas pencatatan setiap transaksi keuangan perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan mendapat perhatian dalam ekonomi global. Namun konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan masih belum seragam dengan pandangan yang masih beragam tentang kegunaan dan aplikasinya.

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun fisik, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan komunitas dimana mereka berada (Mirza dan Imbuh, 1997 dalam Januarti dan Apriyanti, 2006). Tanggung jawab sosial perusahaan dibagi dalam tiga level area, yaitu: (1) *Basic Responsibility* merupakan tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, misalnya kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan dan memuaskan pemegang saham, (2) *Organisational Responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan *stakeholder* seperti : pekerja, konsumen, pemegang saham dan masyarakat sekitar, (3) *Social Responsibility* menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan (Cahyonowati, 2003 dalam Januarti, 2006)

Tanggung jawab lingkungan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan

sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder* yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum (Handayani, 2010)

2.2.6 Akuntansi Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan (*Corporate Environmental Responsibility*)

Berbagai dampak negatif dari operasi perusahaan, memerlukan suatu sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan membutuhkan pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Perlakuan terhadap masalah pengelolaan limbah menjadi penting kaitannya sebagai sebuah pengendalian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Setiawan, (2013) menjelaskan bahwa perhatian terhadap lingkungan merupakan elevator bisnis dalam memperoleh laba jangka panjang. Tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan timbul sebagai respon atau tindakan proaktif yang dilakukan perusahaan terhadap harapan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan (Musyarofah, 2013).

Kesuksesan banyak perusahaan paling tidak ditentukan oleh tiga faktor, yaitu kualitas, profitabilitas, dan tanggung jawab lingkungan (Roth dan Keller, 1997). Pengelolaan lingkungan dalam bisnis telah berkembang dari waktu ke waktu dengan pemahaman lingkungan yang lebih baik terkait keuangan, biaya dan manfaat sebagai input untuk akuntansi manajemen konvensional. Stimulus utamanya adalah pada faktor yang terkait dengan lingkungan yang dapat meningkatkan profitabilitas dan posisi keuangan perusahaan (Ismail dkk.,2007)

Perusahaan tidak akan dapat memasukkan perubahan-perubahan lingkungan sampai akuntan mengidentifikasi dan mengintegrasikan masalah ini ke dalam keputusan manajemen. Praktek akuntansi manajemen konvensional menekankan pada pengidentifikasian dan pengendalian biaya-biaya yang berhubungan dengan proses bisnis perusahaan untuk menghasilkan dan menetapkan harga produk (Sambharakreshna, 2009).

Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur besaran tanggung jawab entitas terhadap lingkungan hidupnya adalah; (a) Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang cukup dikaitkan dengan tanggung jawab lingkungan hidup, (b) usaha entitas dalam mengatasi limbah perusahaan, (c) usaha entitas dalam mengatasi limbah perusahaan meskipun perusahaan mengalami kerugian, (d) Usaha entitas dalam mengatasi limbah perusahaan meskipun perusahaan harus menutup usahanya manajemen tidak menyadari bahwa proses bisnis yang dilakukan tersebut melibatkan faktor-faktor lingkungan dan mempengaruhi lingkungan tersebut (Sari dan Hadiprajitno, 2013)

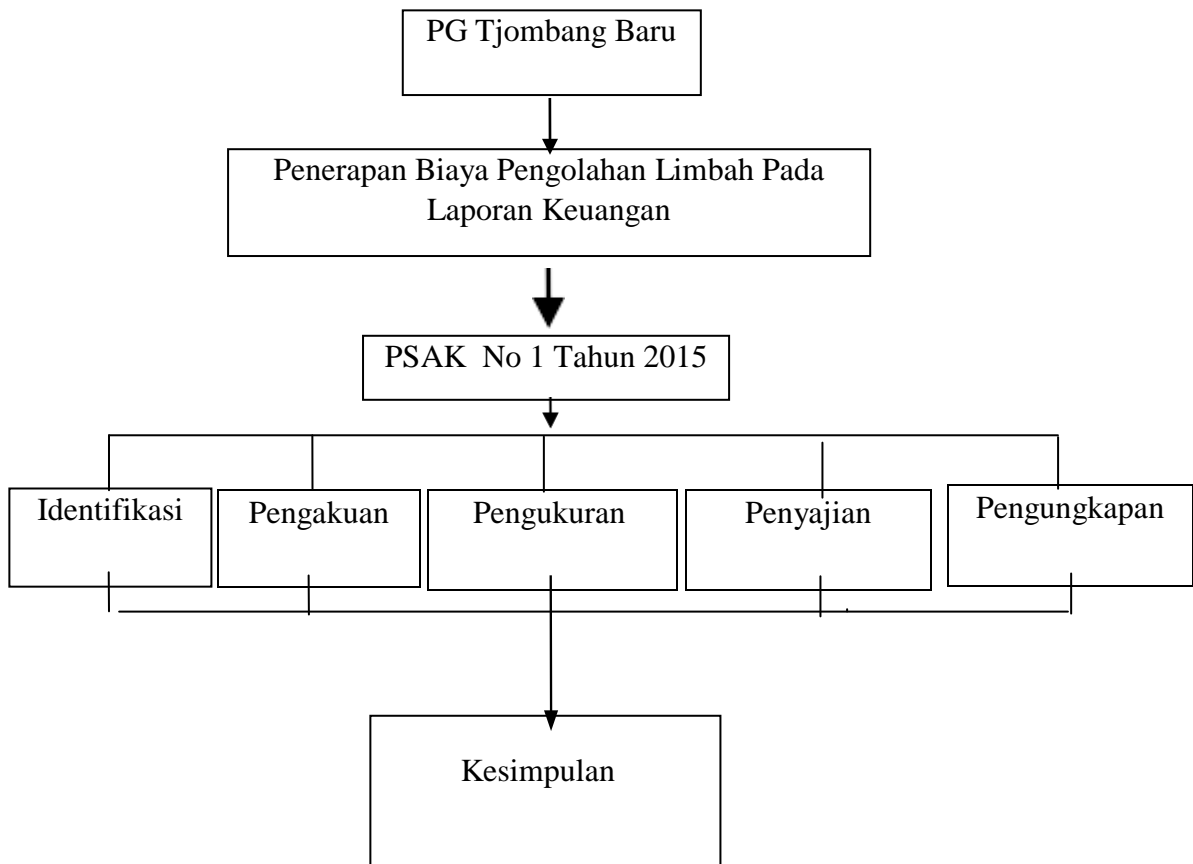
Jika lingkungan tidak dikelola dengan baik akan menanggapi respon perusahaan terhadap permasalahan lingkungan. Sehingga diharapkan bahwa publikasi hasil akuntansi lingkungan akan berfungsi baik sebagai alat bagi organisasi untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan entitas atas akuntabilitas kepada *stakeholder* dan secara tidak langsung sebagai sarana untuk evaluasi yang tepat dari kegiatan pelestarian lingkungan (Rustika, 2011).

Akuntansi manajemen lingkungan mengembangkan biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai upaya untuk mengendalikan dan mencegah limbah dan polusi yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia, misalnya, biaya-biaya yang terjadi untuk mencegah dihasilkannya limbah atau polusi, biaya pengendalian dan daur ulang limbah yang dihasilkan, serta biaya untuk memulihkan wilayah yang terkena polusi (Rustika, 2011). Dengan demikian maka perusahaan membuktikan kepada *stackholder* bahwasanya perusahaan tersebut telah menjalankan kewajibannya, yakni tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

2.3 Rerangka Konseptual

Pengungkapan mengenai biaya lingkungan bagi perusahaan sudah menjadi suatu kewajiban, agar dapat mempermudah para investor dalam pengambilan keputusan (Kusumaningtias, 2013). Hal ini sesuai dengan UU No 40 tahun 2007. PG Tjombang Baru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, yang dalam menjalankan aktivitasnya menghasilkan banyak limbah yang dapat mencemari lingkungan. Perusahaan diuntut untuk mengungkapkan biaya-biaya terkait lingkungannya, namun PG Tjombang Baru belum mengungkapkan secara terperinci.

Biaya- biaya lingkungan tersebut masih di golongkan ke dalam biaya *overvead* dan biaya lain-lain. Penerapan *green accounting* pada perusahaan PG Tjombang Baru, diharapkan mampu mencegah pencemaran lingkungan, menciptakan perusahaan yang berwawasan lingkungan. Berikut rerangka konseptual dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual Penelitian